

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Sugiyanto, S.H., M.H.
Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 November 2025

Pihak Pertama,

Yuwono Agung Nugroho

Pihak Kedua,

Sugiyanto

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	a. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90%
		b. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90%
		c. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer	100%
		d. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	95%
		e. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	95%
		f. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	90%
		g. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer	90%
		h. Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer	70%
		i. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%
		j. Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%
		k. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99%
		l. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	84%

		m. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		n. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		o. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		p. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	81%
		q. Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		r. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	44%
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	a. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer	90%
		b. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		c. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan	60%
3	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal	a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	3,8
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8
		c. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani	100%
4	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang prima dan optimal	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	76,3
		b. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	91,00
		c. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer	3,8

		d. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	3,8
		e. Indeks layanan SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8

Kegiatan

Anggaran

1. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan

Rp. 2.091.711.000
2. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau

Rp. 3.513.559.000
3. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal

Rp. 2.882.109.000
4. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang prima dan optimal

Rp. 19.306.214.000

Sekretaris Mahkamah Agung RI



Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara



Yuwono Agung Nugroho